

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KOTA PAREPARE TAHUN 2011**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2011.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2011 ini adalah merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

Kota Parepare secara geografis terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan.

Dalam rencana strategis pembangunan daerah Kota Parepare secara garis besar dapat digambarkan sebagai sebuah kota dengan fungsi dan peran yang perlu didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan dalam menunjang perwujudan dan pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut,

sehingga dengan demikian, maka fasilitas pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di kota ini.

Dengan luas 99,33 Km², Kota Parepare berada pada posisi 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur, dengan kondisi topografi secara umum terbagi dalam 2 (dua) morfologi, yakni; dataran dan perbukitan. Bentuk lahan dataran terletak di wilayah pesisir pantai, dan secara umum merupakan daerah yang cukup padat, pusat aktifitas kota, disebut sebagai Kota Bawah dengan luas sekitar 30% dari luas wilayah. Sementara itu, sekitar 70% dari luas wilayah lainnya adalah lahan perbukitan yang merupakan wilayah dominan di Kota Parepare, serta memanjang dari arah utara selatan dan timur barat. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan yang sifatnya terbatas, karena ada sebagian kondisi topografi yang mempunyai tingkat kelerengan yang curam. Secara administratif, Kota Parepare terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk kota Parepare Tahun 2010 berjumlah 129.262 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk yaitu sebesar 97 (kurang dari 100). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan rincian 63.481 jiwa penduduk laki-laki dan 65.781 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk yaitu 1.196 jiwa/km² pada Tahun 2009 menjadi 1.301 jiwa/km² pada Tahun 2010.

Jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ditambah 65+ tahun) adalah 45.518 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 83.744 orang yang disebut dengan usia produktif. Dengan demikian, besarnya angka beban tanggungan adalah sebesar 54,35 orang atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Parepare pada tahun 2010 menanggung beban ekonomi sekitar 54 orang usia tidak produktif, angka beban tanggungan ini meningkat dibanding dengan tahun 2009 yaitu berkisar 52 orang.

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota Parepare berjumlah 89.717 orang yang terdiri dari 58.522 orang Angkatan Kerja dan 31.195 orang Bukan Angkatan Kerja. Dilihat dari status pekerjaan utamanya, 38,65 persen penduduk Kota Parepare merupakan buruh/karyawan (termasuk di dalamnya pegawai pemerintahan) dan yang paling sedikit yaitu pekerja bebas di sektor pertanian (0,28 persen).

Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kota Parepare bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berjumlah sekitar 38,95 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor jasa.

Secara makro, pembangunan ekonomi Kota Parepare dalam periode lima tahun terakhir semakin menunjukkan peningkatan dengan pencapaian terbaik pada tahun 2010 yang mampu menembus level 8 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 7,58 persen. Sektor ekonomi yang paling tinggi kontribusinya dalam PDRB Kota Parepare adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni rata-rata kontribusi pertahun sebesar 25,07 persen, kemudian sektor angkutan dan komunikasi sebesar 20,36 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 20,97 persen. Perkembangan PDRB harga berlaku pada Tahun 2010 adalah sebesar 18,27 persen atau sebesar Rp.1.796.670,56 (juta), sementara PDRB berdasarkan harga konstan Tahun 2010 adalah sebesar Rp.767.162,91 (juta) dengan pertumbuhan 8,47 persen.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan didominasi sektor bank dan lembaga keuangan sebesar 24,85 persen, sektor bangunan/konstruksi tumbuh 9,58 persen, selanjutnya listrik, gas dan air bersih sebanyak 9,23 persen.

PDRB perkapita Kota Parepare setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2006-2010, PDRB perkapita Kota Parepare meningkat dari Rp.7.836.823 menjadi Rp.13.899.449 dengan rata-rata PDRB perkapita selama lima tahun tersebut Rp.10.939.784.

Dalam rangka mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia Kota Parepare, maka digunakan parameter *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dengan menggunakan 3 (Tiga) indikator yaitu:

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2010 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 74,27 tahun, meningkat dibanding tahun 2009 yang besarnya sekitar 73,92 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2009-2010. Indeks kesehatan Kota Parepare tahun 2010 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 70,00 tahun.

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen angka melek huruf pada tahun 2010 mengalami sedikit peningkatan dari 97,06 persen menjadi 97,16 persen. Sementara itu, rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 dan 2010 relatif sama yaitu sebesar 9,63 persen. Angka ini lebih tinggi daripada angka Sulawesi Selatan yang hanya sekitar 7,84 persen.

3. Indeks Paritas / Kemampuan Daya Beli

Komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Parepare dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli

penduduk Kota Parepare pada tahun 2009 sekitar 640,04 ribu rupiah, dan pada tahun 2010 sekitar 641,55 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sekitar 635,48 ribu rupiah dan pada tahun 2010 mengalami sedikit kenaikan menjadi 636,60 ribu rupiah.

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (*output* pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 2009 sekitar 77,45 mengalami peningkatan menjadi 77,78 pada tahun 2010. Pada tahun 2010 posisi IPM Kota Parepare tetap pada posisi ke 2 (dua) dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2011 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare 2008-2013, dengan visi ***“Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan”***.

1. *Bandar Madani* adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya berlangsung kehidupan yang sejahtera dan ber peradaban dengan dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi. Citra Bandar Madani ditandai oleh pencapaian pada kesejahteraan dan peradaban yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman.
2. *Mandiri* adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, produktif, sadar kewajiban, dan berdaya. Citra mandiri ditandai oleh pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan,

kemampuan memproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat, serta mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya yang ada.

3. *Religius* adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama manusia.
4. *Berkomitmen Lingkungan* adalah kondisi tatanan masyarakat yang menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Untuk mendukung visi tersebut, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota yang diarahkan pada : *pertama*, mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat; *ketiga*, mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas kota; *keempat*, mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; *kelima*, mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan humanis; dan *keenam*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 terdiri dari: (1) Pengembangan Parepare sebagai Kota Jasa dan Niaga; (2) Pengembangan Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Kota Sehat; (3) Pengembangan Parepare sebagai Kota Maju; (4) Pengembangan Parepare sebagai Kota Hijau; (5) Pengembangan Parepare sebagai Kota Rohani; dan (6) Pengembangan Parepare sebagai Kota Pelayanan.

Khusus terkait dengan strategi dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, diarahkan :

- a) Belanja daerah didahulukan untuk penganggaran dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mengikat dan bersifat wajib yang secara rutin harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan kewajiban kepada pihak ketiga;

- b) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan
- e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare tahun 2011, berikut uraian capaian pelaksanaan program-program pembangunan menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan. Sehingga sektor ini harus mendapatkan prioritas program dan kegiatan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan ini sebesar Rp.228.432.704,285,- dengan realisasi anggaran Rp.197.015.775.206,- atau 86,25 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

a) *Program Pendidikan Anak Usia Dini*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebagai sarana dan media bagi guru, serta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dalam bentuk Bintek Konseling guru TK

b) *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bimbingan pra UN SMP/MTs dan SD/MI, penyelenggaraan pendidikan gratis untuk 133 sekolah jenjang pendidikan dasar, pembinaan KKG tingkat SD dan pembinaan MGMP mata pelajaran SMP, serta bintek pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah.

c) *Program Pendidikan Menengah*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan mebeleur serta perlengkapan sekolah. Pencapaian program ini terlihat meningkatnya daya tampung siswa. Pada Tahun Pelajaran 2011/2012 jumlah siswa SD/MI sebanyak 17.887, siswa SMP/MTs sebanyak 7.859, siswa SMA/MA/SMK sebanyak 8.398. Peningkatan daya tampung tersebut tentunya diikuti dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), untuk APK tingkat SD mencapai 109,88%, tingkat SMP mencapai

114,93% dan tingkat SM mencapai 140,58%. APK ini memberi gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah anak yang berusia sekolah sesuai jenjang pendidikan. Artinya, jika persentase mencapai nilai 100%, berarti jumlah anak yg bersekolah sama dengan anak berusia sekolah sesuai jenjang pendidikan dan apabila nilainya lebih dari 100%, berarti ada anak berusia sekolah yang bersekolah berasal dari luar daerah Kota Parepare.

d) *Program Pendidikan Non Formal*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain: pemberdayaan tenaga pendidik non formal, pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, penyelenggaraan pembelajaran program Paket B setara SMP, serta pembinaan pelaksanaan Kejar Paket C setara SMA.

e) *Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain: pelaksanaan sertifikasi pendidik, pengembangan dan peningkatan mutu supervisi akademik bidang pendidikan, bintek *lesson study* bagi guru SMA/SMK, bintek penerapan manajemen berbasis sekolah

f) *Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain: antara lain pembinaan dewan pendidikan, pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi mata pelajaran siswa sekolah tingkat nasional.

g) *Program Pendukung Pendidikan Gratis.*

Program ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain penyediaan dana bantuan operasional SLTA, yaitu pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa SMA/SMK sebanyak 29 sekolah, serta

penyediaan dana bantuan operasional TK/SD/SMP, agar proses belajar mengajar di TK/SD dan SMP dapat berjalan lancar.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penanganan bidang kesehatan yang berorientasi pada aspek pengelolaan manajemen kesehatan serta pelayanan dasar dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk penyelenggaraan urusan ini dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD A.Makkasau anggaran belanja sebesar Rp.87.181.191.546,- dengan realisasi anggaran Rp.63.313.253.415,- atau 72,62 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang ada pada Gedung Pengelola Obat Publik (GPOP) diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan kesehatan pada 6 (enam) unit kerja Puskesmas, RS Kusta, Klinik, Poskeskel dan puskesmas pembantu se-Kota Parepare.
- b) *Program Upaya Kesehatan Masyarakat*, dimaksudkan sebagai upaya pembenahan seluruh sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan masyarakat terutama fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu serta puskesmas keliling dalam memberikan pelayanan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c) *Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*, merupakan upaya pembinaan kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan serta penyebaran informasi melalui pengadaan brosur-brosur, pamflet-pamflet yang berisikan informasi dan tata cara perilaku hidup sehat (PHBS), media surat kabar dan radio FM serta media elektronik. Selain itu juga dilakukan pengorganisasian

masyarakat dilakukan dalam bentuk pengembangan daerah-daerah percontohan, seperti Desa Siaga, dan KIA sesuai dengan strategi promosi kesehatan, Advokasi, Bina Suasana dan Gerakan pemberdayaan Masyarakat (ABG).

- d) *Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular*, adalah diaktifkannya upaya pencegahan dan proteksi serta tindakan dini melalui kegiatan penyemprotan/ fogging, vaksinasi, imunisasi secara teratur, serta peningkatan surveilans terhadap kemungkinan kasus yang mewabah. Termasuk di dalamnya juga kegiatan pelayanan kesehatan haji.
- e) *Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya*, adalah merupakan upaya peningkatan pelayanan berupa penambahan, rehabilitasi ringan dan berat terhadap sarana dan prasarana pelayanan yang diperuntukkan bagi puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
- f) *Program Upaya Kesehatan Daerah*, merupakan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda) yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan fasilitas kelas III kepada masyarakat yang belum/tidak mempunyai asuransi kesehatan. Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 12.899 kunjungan rawat jalan dan rawat inap sebanyak 4.373 kunjungan.
- g) *Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin*, adalah tersedianya anggaran yang digunakan untuk menanggulangi selisih biaya antara paket pelayanan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan, dengan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan Perda Kota Parepare Nomor 33 Tahun 2003, serta terwujudnya proses pemulasaran mayat secara lebih baik dan layak serta terjangkau oleh masyarakat miskin. Dalam

pelaksanaan program ini, jumlah kunjungan rawat jalan sebanyak 13.626 kunjungan dan rawat inap sebanyak 802 kunjungan.

- h) *Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit*, adalah penyediaan sarana dan prasarana yang antara lain pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, pengadaan obat-obatan RS, rehabilitasi gedung Cardiac Centre RS, rehabilitasi gedung bangsal RS, rehabilitasi gedung VIP RS, pembangunan gedung radiologi, pembangunan gedung kamar bersalin, pembangunan gedung laboratorium, rehabilitasi gedung gizi, tambahan peralatan instalasi gizi, sanitasi RS, pengadaan mebeleur ruang rawat inap Kelas III, pengadaan alat-alat kesehatan IGD, penambahan ruang rawat inap rumah sakit (Kelas III), pengadaan peralatan PONEK RS, pengadaan alat-alat kesehatan IGD RS.

3. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.14.131.564.700,- dengan realisasi anggaran Rp.12.674.341.328,- atau 89,69 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

a) *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*

Penanganan sampah yang berhasil berhasil ditangani/diangkat sebanyak 499 m³ sampah produksi masyarakat (perhari) dari sejumlah 589 m³, atau dengan persentase capaian sebesar 83,44 persen, yang didukung daya tampung TPS/kontainer /tong sampah adalah sebanyak 680 m³. Selain itu, pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan dilakukan pengelolaan dengan cara pengkomposan dan daur ulang. Pengelolaan sampah organik juga telah dilaksanakan di TPA AloppoE, Pasar Lakessi, serta 20 lokasi perumahan sebagai percontohan. Output

dari kegiatan tersebut adalah dengan dihasilkannya pupuk organik sebanyak \pm 10 ton dan penjualannya memberikan kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Parepare.

b) *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*

Merupakan program prioritas dalam upaya pemenuhan target 30% ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan serta menjaga kualitas dan kuantitas RTH tersebut. Untuk pemenuhan target tersebut dilaksanakan berupa pengadaan bibit tanaman, sungkup dan alat-alat penunjangnya serta pemeliharaan tanaman, pohon, pot dan taman. Sehingga tahun 2013 target 30% ruang terbuka hijau dapat terpenuhi.

c) *Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*

Merupakan program prioritas yang dimaksudkan untuk memantau dan menjaga kualitas lingkungan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, antara lain pelaksanaan koordinasi dengan seluruh *stakeholder*, memfasilitasi Tim Penilai Adipura Tingkat Kota dan Tim Tingkat Regional Sumapapua. Outcome dari program ini adalah diraihnya *Anugrah Piala Adipura kategori Kota Sedang* yang ke-7 kalinya dimana merupakan penghargaan tertinggi atas keberhasilan dalam bidang kebersihan dan penataan keindahan kota. Piala ini diserahkan oleh Presiden RI pada tanggal 7 Juni 2011 di Istana Negara.

d) *Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*

Berisi kegiatan yang realisasinya berupa pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan seperti pengadaan tempat sampah, pemilahan dan pelapukan, pengadaan alat biopori, pengadaan peralatan laboratorium, pemasangan papan himbauan, pembuatan sumur resapan, pembangunan talud, pembangunan gedung cacah plastik, serta penanaman pohon peneduh dan produktif pada lokasi-lokasi strategis.

e) *Program Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan*

Di Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pengawasan Tambang Galian Golongan C, Penyusunan Perda bidang Pertambangan, Pendataan Potensi Tambang Kota Parepare, Pemetaan Sungai LompoE dan Sungai LamarE serta Penyediaan Peralatan Tambang (Konvensional) untuk Penambang Tradisional di Kota Parepare.

4. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang serta Pengawasan Bangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.86.256.155.300,- dengan realisasi anggaran Rp.54.330.173.092,- atau 62,99 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*, dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pembangunan jalan maupun jembatan dengan capaian kinerja panjang jalan bertambah sekitar 2.332 meter, jumlah perintisan jalan mencapai 300 meter, pembangunan dan rehabilitasi trotoar sepanjang 11.000 meter, serta pengaspalan sepanjang 241 meter.
- b) *Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong*, dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya banjir ataupun genangan air dengan capaian kinerja: pembangunan plat penutup saluran/drainae mencapai 2.673 meter, rehabilitasi duiker dengan realisasi 5 unit, serta pembangunan saluran drainase mencapai 4.955 meter.
- c) *Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong*, dengan realisasi pembangunan turap/talud/bronjong mencapai 1.523 meter atau

terpeliharanya jalan dalam kondisi baik sepanjang 706,15 meter, pembangunan tanggul 178,30 meter, serta rehabilitasi tanggul sebanyak 61 meter.

- d) *Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*, dengan realisasi terbangunnya saluran irigasi untuk pertanian kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wt. Bacukiki, masing-masing 1.726 m² untuk Kelurahan Wt. Bacukiki, dan 617 m² untuk Kelurahan Lemoe dengan area 400 Ha, melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, serta penyediaan bak-bak penampungan/reservoir bagi masyarakat pada titik rawan suplay air minum di waktu musim kemarau sebanyak 7 unit kapasitas 16 m² melalui kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum.
- e) *Program Pemeliharaan Jalan Umum*, dengan capaian kinerja terpeliharanya 4.700 titik lampu, meterisasi lampu penerangan jalan, pengadaan, pemasangan dan rekondisi lampu jalan umum, pengadaan dan pemasangan lampu hias, rehabilitasi jaringan bawah tanah, penambahan daya PJU, pengadaan lampu jalan dengan *system solar cell* dan pembangunan menara lampu sorot lapangan Andi Makkasau.

5. Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dan Perumahan

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.21.561.629.450,- dengan realisasi anggaran Rp.15.879.406.713,- atau 73,65 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Perencanaan Tata Ruang*, dengan realisasi kegiatan sosialisasi rencana pembangunan, pengendalian perumahan dan permukiman daerah (RP4D) Kota Parepare Tahun 2011-2020 yang merupakan

penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kegiatan lain pada program ini, yakni penyuluhan tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP), berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- b) *Program Peningkatan Kawasan Perkotaan*, kegiatan pada program ini diantaranya peningkatan kawasan permukiman dengan pembangunan jalan lingkungan/lapin, jalan setapak (paving blok, rabat beton), saluran, penutup saluran, dan plat duiker yang telah dilaksanakan merata di 22 Kelurahan sekota Parepare. Keseluruhannya berjumlah 73 paket pekerjaan dengan rincian Kecamatan Bacukiki 14 pekerjaan, Kecamatan Bacukiki Barat 21 pekerjaan, Kecamatan Soreang 23 pekerjaan, serta Kecamatan Ujung 15 pekerjaan.
- c) *Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Kumuh*, merupakan kegiatan *rehabilitasi atau perbaikan jalan setapak* (paving blok) sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan masing-masing di kelurahan Ujung Sabbang, Lumpue, Bukit Harapan, Kampung Baru dan Bukit Indah.
- d) *Program pengendalian pemanfaatan ruang*, dilaksanakan dengan membentuk Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang Kota Parepare dengan berdasar pada RTRW Kota Parepare, dan terlaksananya tugas-tugas dan oprasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare serta meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyangkut peraturan zonasi, tapal batas sempadan, perizinan, pemanfaatan dan evaluasi serta penertiban.

6. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik

Kedua urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.6.308.681.798,- dengan realisasi anggaran Rp.4.552.362.514,- atau 72,16 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) Dalam pelaksanaan *Program Perencanaan Pengembangan data / informasi*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan profil daerah Kota Parepare, pembinaan dan pengawasan penelitian adalah terbentuknya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Parepare, serta pengelolaan website Bappeda.
- b) Untuk *Program Pengembangan Wilayah Perbatasan* direalisasikan dalam bentuk kegiatan tim fasilitasi operasional forum komunikasi peduli teluk Parepare untuk meningkatnya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan teluk Parepare.
- c) Dalam *Program Perencanaan Pembangunan Daerah*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang antara lain pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi tahunan RPJMD dan penyusunan petunjuk teknis pagu indikatif.
- d) *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi*, dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, antara lain penyusunan indikator ekonomi, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, penataan kawasan

wisata Lappa Anging dan desa wisata, strategi pengembangan investasi Kota Parepare.

- e) Pada *Program Perencanaan Sosial Budaya* terdapat 4 item kegiatan dengan capaian realisasi program antara lain koordinasi penyelenggaraan kota sehat, penyusunan indeks pembangunan manusia, kajian manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dan penyusunan buku sejarah Kota Parepare.
- f) Untuk *Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam*, realisasi kegiatan antara lain koordinasi penataan ruang terbuka hijau (RTH), koordinasi oprasional kebun raya jompie, penataan rumput kebun raya Parepare, koordinasi dan evaluasi ranperda konservasi alam daerah, pembangunan kolam habitat air tawar kebun raya Parepare, pembangunan sumber air bor kebun raya Parepare.
- g) Pada *Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah* pada program ini terdapat 2 item kegiatan yakni penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, dan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data PDRB.

7. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, serta Kebudayaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.3.626.628.757,- dengan realisasi anggaran Rp.2.898.723.961,- atau 79,93 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, yaitu :

- a) *Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*, dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan (Pelatihan Paskibraka dengan peserta sebanyak 64 orang, dan Pelatihan Aubade dengan peserta 120 orang) dengan hasil telah tersedianya pasukan

paskibraka dan tersedianya peserta aubade pada HUT RI. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi undang undang kepemudaan.

- b) *Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendataan potensi olahraga sehingga terkumpul data base potensi olahraga di Kota Parepare
- c) *Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dengan mengadakan pelatihan bagi pelatih senam dan pemasyarakatan senam kesegaran jasmani. Juga diselenggarakan pemassalan gerak jalan dan pawai kreasi TK, SD, SLTP, SLTA dan umum, serta invitasi bola basket dan Bandar Madani 10 KM .
- d) *Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga*, dilaksanakan untuk mendukung pembinaan olahraga melalui penyediaan sarana olahraga yang memadai dengan pemeliharaan Lapangan Andi Makkasau dan Gedung Olahraga (Gedung KONI Parepare).

8. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.842.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.627.995.500,- atau 74,54 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM*, dilaksanakan penagihan dan penyelesaian dana bergulir pada tahun 2011 dilaksanakan dalam bentuk penagihan dan penyelesaian dana bergulir. Diharapkan melalui kegiatan ini akan mampu mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan penggunaan dana pemerintah.

- b) *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM*, dilaksanakan melalui peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga dalam upaya peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga perbankan dan UMKM, pelatihan metode penyusunan proposal untuk pengajuan bantuan kredit kepada pihak perbankan, promosi produk usaha mikro kecil menengah, penyelenggaraan pameran pembangunan, pembinaan koperasi dan studi kredit UMKM.
- c) *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*, dilaksanakan melalui sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, untuk 80 koperasi berprestasi di Kota Parepare. Selain itu telah dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan koperasi dalam bentuk pendataan dan pelaporan kinerja koperasi aktif. Untuk tahun 2011 terdapat 71 unit koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pencapaian SHU pada tahun 2011 mencapai Rp.3.129.137.000,-. Untuk perkembangan jumlah modal koperasi hingga tahun 2011 yang menggunakan modal sendiri adalah sebesar Rp.29.966.298.000,- untuk modal luar adalah sebesar Rp.31.260.408.000 dengan jumlah anggota sebanyak 19.976 orang. Jumlah modal koperasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koperasi di Kota Parepare sudah layak diperhitungkan bilamana dilihat dari jumlah volume usaha koperasi tahun 2011 yang berkisar pada Rp 11.173.850.000,-. Bahkan dalam menunjang pengelolaan manajemen koperasi, digelar Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang diikuti oleh 90 koperasi dengan maksud agar tercapainya pengelolaan koperasi yang mandiri.

9. Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.842.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.627.995.500,- atau 74,54 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu*, dengan membangun jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini didukung dengan sistem komputerisasi sehingga pelayanan bisa lebih maksimal dan akurat.
- b) *Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan*, dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dengan pencetakan blangko KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan (Non Muslim) dll. Selama tahun 2011 telah dilayani dan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 15.253 buah, Kartu Keluarga (KK) 9.934 lembar, Akta Kelahiran sebanyak 2.644 buah, Akta Perkawinan 53 buah serta lain-lain surat keterangan kependudukan dan berbagai peristiwa penting yang terjadi.
- c) *Sosialisasi Kegiatan Kependudukan*, dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai penjabaran UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan kependudukan di setiap kecamatan dengan melibatkan: tokoh masyarakat, ketua RW/RT, LPMK, LSM, petugas kesehatan, aparat kecamatan dan kelurahan.

10. Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.986.957.325,- dengan realisasi anggaran Rp.4.551.162.623,- atau 91,26 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, dengan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja, pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui 4 paket kejuruan yaitu Kejuruan Bahasa Inggris, Kejuruan Automotif, Kejuruan Operator Komputer, Kejuruan Las Listrik. Selain itu, dengan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
- b) *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*, direalisasikan dengan penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, pembentukan dan pendayagunaan TKPMP pendamping UKM. Selain itu juga, dilaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah, serta perluasan kerja pengangguran putus sekolah, melalui pelatihan pembuatan anyaman yang hasilnya dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- c) *Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan*, dilaksanakan dalam bentuk beberapa kegiatan, antara lain pemeriksaan dan pengujian objek K3, pemeriksaan norma kerja, hygiene dan ergonomi. Bahkan Sebagai upaya peningkatan peran serta unsur LKS Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha, telah dilaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2011. Selain itu, dalam upaya perlindungan tenaga kerja, juga dilaksanakan pelatihan bagi panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, sosialisasi norma kerja perempuan dan anak, sosialisasi Program Jamsostek dan Perlindungan Upah Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi pekerja dan pengusaha (Hukum Acara Ketenagakerjaan).

11. Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.2.277.438.200,- dengan realisasi anggaran Rp.2.233.165.474,- atau 98,06 persen, yang dilaksanakan melalui kegiatan untuk ketahanan pangan maupun penyuluhan kepada masyarakat pangan, petani dan kelompok-kelompok tani binaan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

12. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.854.698.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.897.289.560,- atau 80,28 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak*, direalisasikan melalui fasilitasi pusat pengembangan terpadu pemberdayaan perempuan yang berfungsi melayani dan menangani kasus korban dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b) *Program peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan*, dilaksanakan melalui pembinaan organisasi perempuan, penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, serta peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)
- c) *Program Keluarga Berencana*, terlaksana dengan baik dengan pemberian pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin melalui kegiatan Bulan Bhakti KB-IBI, Operasional Manunggal KB-Kesehatan TNI dan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan dan KB-POLRI. Selain itu juga dilaksanakan dengan pembinaan meeting kader

instutusi (PPKB dan Sub PPKB). Tahun 2011, terdata PPKBD sebanyak 22 orang, sub PPKBD sebanyak 148 orang. Institusi ini membantu kegiatan KB ditingkat kelurahan dan tingkat RW dan RT serta pemberian pengertian KB kepada para institusi sehingga program KB dapat terlaksana dengan baik

- d) *Program pelayanan kontrasepsi*, direalisasikan melalui pelayanan pemasangan kontrasepsi KB untuk pelayanan akseptor khususnya kontap (tubektomi) dioperasi tutup kandungan sebanyak 107 akseptor, akseptor IUD sebanyak 177 orang serta akseptor Implant sebanyak 337 orang selanjutnya diberikan biaya komplikasi peserta IUD, Implant dan MOW. Dan diberikan pula jasa pemasangan/pencabutan IUD dan Implant. Untuk pengadaan alat kontrasepsi ini telah diadakan pembelian implant dan side effect sebanyak 144 set khususnya penggunaan kepada akseptor implant yang tahun ini telah dipasang sebanyak 337 orang.
- e) *Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri*, dilaksanakan melalui Rapat Kerja Daerah Program KB Nasional Tingkat Kota Parepare dengan seluruh stakeholder, serta Pengelolaan data dan informasi program KB sebagai bahan penyusunan program.
- f) *Program pengembangan operasional BKB Posyandu – PADU*, dilaksanakan dengan melibatkan beberapa kader dilapangan melalui beberapa lomba sebagai berikut : Lomba BKB, Lomba BKR, Lomba BKL, Lomba BLK, Lomba kader BKB, Lomba KB Lestari, Lomba klinik KB, Lomba PPLKBD, Lomba Sub PPLKBD dan Lomba UPPKS.
- g) *Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga*, dilaksanakan dengan melibatkan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan masyarakat 44 kelompok UPPKS yang ada ditingkat kelurahan, melalui kegiatan pengembangan

permodalan ke UPPKS dengan melibatkan unsur pemberi modal dari BUMN seperti Bank BRI dan Pegadaian.

13. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.6.357.199.500,- dengan realisasi anggaran Rp.5.006.523.316,- atau 78,75 persen yang dilaksanakan dalam bentuk program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain penyusunan kebijakan norma standar dan prosedur bidang perhubungan, tersedianya bahan data Wahana Tata Nugraha (WTM) dan Penyusunan Rancangan Perda Tentang LLAJ Kota Parepare, serta peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- b) *Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Prasarana Fasilitas LLAJ*, direalisasikan dalam kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), rehabilitasi/pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan, serta rehabilitasi pemeliharaan rambu lalu lintas.
- c) *Program Peningkatan Pelayanan Angkutan* dengan kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi, uji kelayakan sarana transportasi, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan, sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan.
- d) *Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas*, direalisasikan dengan pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan, pengadaan *warning light*, kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan keselamatan transportasi darat, pembuatan Traffic Menejemen Center (TMC).

14. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.2.063.532.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.189.088.840,- atau 106,08 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa*, dengan kegiatan pembinaan & pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan mengaktifkan usaha TV kabel, membantu TV lokal meningkatkan layanan TV Kabel kepada masyarakat, dan menertibkan konten siaran yang dapat meresahkan masyarakat. Juga dilaksanakan penyebarluasan informasi tudang sipulung, serta penerbitan buletin sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya.
- b) *Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa*, dilaksanakan melalui kegiatan; penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan Interaktif, penyebarluasan informasi dalam bentuk profil dan pertunjukan media tradisional, operasional Radio Pare Bandar Madani, dokumentasi pembangunan daerah, serta penyebarluasan informasi (KIM).

15. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.7.251.144.607,- dengan realisasi anggaran Rp.5.565.707.652,- atau 76,76 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, sebagai berikut :

- a) *Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal*, dilakukan dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA, posko terpadu, lomba penilaian pos kamling, pembelian perlengkapan alat-alat keamanan lingkungan, serta operasional penertiban dan penegakan perda.

- b) *Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan*, direalisasikan dalam bentuk Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pemerintah Kota, Pelatihan / Pendidikan Bela Negara, serta Workshop Pembauran Bangsa.
- c) *Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan*, pelaksanaannya melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pemerintah Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, ketua RT, LPMK dan unsur-unsur terkait lainnya.
- d) *Program Pendidikan Politik Masyarakat*, dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik, pelatihan dan pendidikan politik bagi pemuda, forum komunikasi dan pertemuan berkala Ormas, LSM dan Pemerintah Daerah, pendidikan politik perempuan, penyuluhan kepada masyarakat tentang Etika Budaya Politik.

16. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain :

- a) **Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Pembinaan Perangkat Daerah serta persandian.**

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan program dan kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah Kota yang terdiri dari 10

(sepuluh) bagian yaitu : Pemerintahan, Humas, Hukum & Perundang-undangan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi, Pembangunan, Keuangan, Umum, Asset dan Organisasi dengan alokasi Rp.55.965.625.794,- dengan realisasi Rp.43.926.340.495,64,- atau 78,49 persen. Beberapa program yang dilaksanakan, antara lain :

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, sebagai bentuk realisasi kewajiban kepala daerah dalam melakukan pertanggungjawaban administrasi fisik dan keuangan setiap tahun anggaran berakhir.
- 2) Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan terutama lahan-lahan yang di atasnya berdiri fasilitas publik, serta asset Pemerintah Kota Parepare. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan terutama untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum dalam upaya penataan dan pemanfaatan tanah.
- 3) Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah, dilaksanakan dalam bentuk operasionalisasi website Pemerintah Kota Parepare (www.pareparekota.go.id), kontrak halaman Parepare Bandar Madani, visualisasi kegiatan Pemerintah Kota Parepare dan pengadaan sarana pengaduan masyarakat melalui SMS Centre.
- 4) Peningkatan Pemanfaatan asset daerah dilaksanakan sebagai wujud penertiban administrasi terhadap asset daerah khususnya tentang adanya rekomendasi pemanfaatan tanah dan bangunan pemerintah Kota Parepare.

- 5) Pekerjaan fisik pembenahan Kantor Walikota, rehabilitasi Gedung Hipmi di Makassar, rehabilitasi rumah adat, pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010, serta sertifikasi calon PPK.
- 6) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pembinaan Kelompok Budaya Kerja, serta sayembara dan lokakarya hymne dan lambang daerah.
- 7) Pameran serta promosi pembangunan daerah, penyaluran beras raskin, mengintensifkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan kalangan usaha maupun perbankan.
- 8) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, publikasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk publikasi melalui Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (SJIDH).
- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain penyusunan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan APBD, penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, bintek penyusunan laporan keuangan, bimbingan teknis penyusunan anggaran, bimbingan teknis perbendaharaan, bintek Pembinaan dan pengawasan verifikasi, *workshop* akuntansi, kursus keuangan daerah, dan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, serta kegiatan administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP).

b) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Program ini dialokasikan Rp. 14.787.774.765,- dengan realisasi Rp.10.429.577.043,- atau 70,53 persen. Sasaran program ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya.

Pencapaian pendapatan atau realisasi pendapatan daerah Kota Parepare pada Tahun 2011 mencapai Rp.482.666.562.262,12 atau 81,86 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.589.662.580.566,00. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Bagian Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan anggaran sebesar Rp 55.204.321.347,00 direalisasikan sebesar Rp 35.401.458.062,10 atau sebesar 64,13 persen.
- 2) Bagian Dana Perimbangan pada APBD tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.398.229.843.413,- dengan realisasi sebesar Rp.332.188.868.109,- atau sebesar 83,42 persen yang meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.136.188.415.806 dengan realisasi sebesar Rp.115.076.236.091,02 dengan persentase sebesar 84,50% yang terdiri dari bagi hasil pajak dari propinsi, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian otonomi khusus.

c) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja

Program ini dialokasikan dengan anggaran Rp.3.339.970.000,- dengan realisasi Rp.3.017.048.699,- atau 90,33 persen. Sasaran program ini

adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator realisasi pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1) *Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah*, beberapa program yang dilaksanakan antara lain pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS sebanyak 15 kasus, dan menerbitkan 15 LHP, pemeriksaan dugaan pelanggaran PP Nomor 10 Tahun 1983 sebanyak 35 kasus dan menerbitkan 35 LHP, pemeriksaan mutasi jabatan sebanyak 7 kali, dan menerbitkan 7 LHP, penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 15 kasus dan menerbitkan 15 LHP, pemeriksaan komprehensif/PKPT sebanyak 2 kali (8 SKPD) dan menerbitkan 8 LHP, pemeriksaan evaluasi kegiatan sebanyak 1 kali (31 SKPD) dan menerbitkan 1 LHP.

2) *Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*, sebagai upaya guna peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa, telah mengikutsertakan staf/tenaga pemeriksa untuk mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 10 kali baik dalam propinsi maupun luar propinsi serta mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri dalam bentuk sinergitas dengan APIP sebanyak 4 kali.

Selama Tahun 2011, kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai representasi Pemerintah Daerah Kota Parepare di bidang pengawasan, evaluasi dan monitoring kegiatan telah memperlihatkan peningkatan kinerja yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan yaitu Penghargaan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Se-Sulawesi Selatan yang responsif dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan Pendidikan Gratis.

d. Program Peningkatan Kinerja Legislatif

Program ini dialokasikan sebesar Rp.19.564.218.650,- dengan realisasi Rp.15.870.376.493,- atau 81,12 persen. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan dengan indikator pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, dilaksanakan juga dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dan terlaksana sebanyak 57 kali pertemuan.

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dilaksanakan dalam bentuk rapim dewan terlaksana sebanyak 15 kali, rapat badan musyawarah terlaksana sebanyak 22 kali, rapat komisi terlaksana sebanyak 92 kali, rapat badan anggaran terlaksana sebanyak 14 kali.

Rapat-rapat paripurna, dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna sebanyak 62 kali, rapat paripurna istimewa sebanyak 1 kali, dari rapat tersebut menghasilkan Keputusan DPRD Kota Parepare sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) keputusan, dan keputusan pimpinan DPRD Kota Parepare sebanyak 4 (empat) keputusan.

Kegiatan reses, merupakan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan dengan konstituen pada dapil masing-masing anggota dewan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun pada saat istirahat masa sidang.

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dilaksanakan oleh dewan pada saat pembahasan RAPBD maupun pembahasan ranperda lainnya dengan mengadakan kunjungan kerja

pada tiap-tiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare, sebanyak 5 kali.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kegiatan ini adalah merupakan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pimpinan dan anggota DPRD baik itu dilaksanakan diluar propinsi maupun dalam Propinsi Sulawesi Selatan. Dilakukan didalam propinsi 5 kali, luar propinsi sebanyak 3 kali oleh tiap pimpinan dan anggota DPRD.

2) Program penataan peraturan perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan masyarakat dari 4 (empat) kecamatan guna mensosialisasikan ranperda inisiatif dari DPRD guna ditetapkan menjadi Perda agar masyarakat sedapat mungkin dapat mengetahui dan memahami perda inisiatif tersebut, dan terlaksana sebanyak 4 kali.

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, merupakan pengkajian Perda-Perda yang telah dihasilkan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik itu merupakan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Permen dan lain-lain.

e. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Alokasi anggaran dalam rangka program pendayagunaan sumber daya aparatur sebesar Rp.6.956.922.353,- dengan realisasi Rp.5.832.332.640,- atau 83,83 persen. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur. Capaian program ini diukur dengan program dan kegiatan, antara lain :

- 1) *Program pendidikan kedinasan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*, dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD dengan capaian kinerjanya adalah CPNSD golongan I sebanyak 6 orang, golongan II sebanyak 188 orang dan golongan III sebanyak 247, diklatpim tingkat II sebanyak 2 (dua) orang dan diklatpim tingkat III sebanyak 4 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 40 orang, pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal terkait akutabilitas pelaksanaan anggaran dan disiplin.
- 2) *Program pembinaan dan pengembangan aparatur*, dilaksanakan dalam bentuk penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, dengan terprosesnya kenaikan pangkat PNSD golongan III ke bawah sebanyak 918 orang dan golongan IV sebanyak 120 orang, penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) pelanggaran hukuman disiplin PNS sebanyak 6 surat keputusan hukuman disiplin sedang, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas ke jenjang pendidikan formal PNSD ke S.1 sebanyak 4 orang S.2 sebanyak 11 orang dan STKS sebanyak 6 orang, pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN sebanyak 34 orang pelamar dan lulus sebanyak 6 orang, penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya dari Presiden RI sebanyak 193 orang dari 193 yang diusulkan dengan rincian kriteria masa pengabdian 30 tahun sebanyak 25 orang, pengabdian 20 tahun sebanyak 117 orang dan 10 tahun sebanyak 55 orang, penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT sebanyak 12 kali rapat, Bimtek Administrasi Kepegawaian, Bimtek Penyusunan standar Kesejahteraan Berbasis Kinerja, penetapan NIP CPNSD

dengan capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi untuk penetapan NIP CPNS.

f. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

Alokasi anggaran yang diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur kecamatan sebesar Rp.18.952.566.157,- dengan realisasi Rp.17.323.988.355,- atau 91,41 persen. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan program dan kegiatan berupa:

- 1) *Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat*, dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat babinkamtibmas dan babinsa, serta pelibatan unsur muspika dalam penanganan pengaduan yang sifatnya diteruskan penyelesaiannya pada tingkatan yang lebih tinggi. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian kasus-kasus yang terbukti mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat serta memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan diupayakan tidak ada yang merasa dirugikan.
- 2) *Pembinaan Imtak dan organisasi kemasyarakatan*, dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an pada tingkat kecamatan untuk dipersiapkan mewakili kecamatan dalam kegiatan yang sama pada tingkat kota. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam mensosialisasikan rencana dan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat. Para ketua RW dan RT ditunjuk untuk mengkoordinir seluruh warga melakukan pendataan penduduk, sehingga diperoleh data mengenai keadaan penduduk dalam suatu wilayah untuk

selanjutnya dijadikan tolak ukur dalam perencanaan pembangunan masyarakat.

- 3) *Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan ini dikhususkan untuk semua aparat pelayanan yang terdapat di kecamatan dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat tersebut. Beberapa pegawai diikutkan dalam pendidikan dan latihan ataupun bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dengan bekerjasama dengan organisasi lain.

g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi program ini adalah Rp.1.809.254.624,- dengan realisasi Rp.1.459.077.685,- atau 80,65 persen. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur pengelola pelayanan perizinan. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

- 1) *Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi*, yang dilaksanakan dengan penyempurnaan sistem informasi terhadap layanan publik yang berstandar sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO versi 9001:2008.
- 2) *Program peningkatan pelayanan perizinan satu atap*, dilaksanakan dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja terselenggaranya pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang berkualitas prima dengan memenuhi klausul – klausul dalam sistem manajemen mutu berstandar internasional ISO Versi 9001:2008, yang dibukukan ke

dalam pedoman mutu dan prosedur mutu atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Selama Tahun 2011, menerima penghargaan dari : 1) FIFO Award Tahun 2011 untuk kategori Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan dari The Fajar Institute Pro-otonomi 2011; 2) Investment Award Tahun 2011 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

h. Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat Korpri

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Parepare dialokasikan anggaran sebesar Rp.908.687.000,- dengan realisasi Rp.495.868.917,- atau 54,57 persen dengan capain program sebagai berikut :

1) *Program fasiltasi pindah/purna tugas PNS* dengan melaksanakan kegiatan Prosesi pemakaman jenazah anggota KORPRI lingkup Pemerintah Kota Parepare. Dan pada Tahun Anggaran 2011 yang telah dilakukan prosesi pemakaman jenazah terhadap 10 (sepuluh) anggota KORPRI lingkup Pemerintah Kota Parepare

2) *Porseni KORPRI*

Pada kegiatan porseni ini diikuti oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Parepare dan dari Instansi Vertikal seperti Kantor Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor BPS Kota Parepare dan Korem 142 Tatag serta Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.

17. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp.2.793.810.600,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.2.727.573.384,- atau 84,65 persen dan dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu :

a) *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perlombaan desa/kelurahan, merupakan program nasional yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional, yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan selama dua tahun terakhir dengan mengukur kinerja beberapa lembaga seperti lembaga ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, agama, keamanan dan ketertiban serta mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat yang berupa pelatihan Perencanaan Pembangunan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia KPM. Selain itu, juga dilaksanakan pembinaan masyarakat miskin, berupa pemberdayaan terhadap 25 Kepala Keluarga Miskin di Lokasi Gerbang Taskin Kelurahan Lemoe, serta Pengadaan Jamban Keluarga Miskin.

b) *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan*, dilaksanakan dalam kegiatan pramusyawarah perencanaan pembangunan (pra musrenbang). Pelaksanaan pramusrenbang dilaksanakan pada tingkat RT dan RW yang melibatkan para pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kelompok perempuan serta kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat dilakukan pemberian stimulasi pembangunan desa, serta digelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bulan Bakti Gorong Royong Masyarakat dilakukan

secara berjenjang dari Tingkat Nasional, Provinsi sampai pada Tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan Bulan Bakti Gorong Royong Masyarakat adalah seluruh kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara gotong royong seperti penyuluhan hukum, perkoperasian, kebersihan, penyuluhan pajak, keagamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk tingkat Kota Parepare pencanangannya dipusatkan di Kelurahan Cappa Galung.

18. Penyelenggaraan Urusan Sosial

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp.2.982.392.000,- dengan realisasi Rp.2.727.573.384,- atau 91,46 persen dan dilaksanakan dalam program antara lain :

- a) *Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS*, melalui Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
- b) *Program pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial* melalui Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, yaitu hukum bagi korban Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan anak yaitu Bimbingan Sosial bagi Korban Trafiking sebanyak 10 orang serta pelayanan orang terlantar. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan stimulasi pemberdayaan bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal sebanyak 50 orang. Tidak hanya itu, kegiatan stimulasi UEP bagi penyandang cacat juga diikuti sebanyak 16 orang, serta stimulasi sosial bagi korban *trafficking* sebanyak 1 Kelompok Usaha Bersama yang beranggotakan 10 Orang.

Untuk pembinaan Tagana diadakan pelatihan dan pembinaan kepada Anggota Tagana sebanyak 49 orang. Juga dilaksanakan pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan pembinaan Karang Taruna Kelurahan sebanyak 4 Karang Taruna, Rehabilitasi tempat-tempat

besejarah juga dilakukan dengan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Paccekke, Taman Makam Pahlawan Kusuma dan Pembangunan Makam Pahlawan A'banuangge dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana gudang Peralatan Bencana.

19. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Alokasi anggaran urusan perpustakaan dan kearsipan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah Rp.1.985.363.500,- dengan realisasi Rp.1.838.355.457,- atau 92,60 persen dan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dengan capaian program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a) *Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan*, melalui kegiatan pengumpulan data, yakni kegiatan yang dilakukan pada seksi kearsipan dengan mengumpulkan arsip yang sifatnya in aktif dari SKPD, untuk selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data berdasarkan kelas dan penggolongannya, yang kemudian disusun berdasarkan sistem katalog data.
- b) *Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan*, didukung dengan penyediaan bahan bacaan melalui kegiatan pengadaan buku perpustakaan yang jumlahnya sebanyak 562 judul dengan 2.113 eksemplar sehingga bahan bacaan menjadi 7.465 judul dengan 21.336 eksemplar. Khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan dari berbagai jenis perpustakaan yang ada, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi terhadap perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat sebanyak 100 perpustakaan yang telah mendapatkan pembinaan dan supervisi dalam pengelolaan perpustakaan tingkat sekolah. Untuk Kegiatan Pengembangan minat baca dan budaya baca kepada masyarakat (lomba perpustakaan) yakni

melakukan penilaian terhadap perpustakaan sekolah di Tingkat SLTA, SLTP dan SD. Untuk memberikan motivasi akan pentingnya budaya baca terhadap masyarakat dilaksanakan *workshop* pengembangan budaya baca terhadap masyarakat, bintek pengelola perpustakaan ditingkat kelurahan, serta pemberian bantuan mebeleur kepada 12 (dua belas) perpustakaan di tingkat kelurahan.

Dalam rangka menjangkau pemukiman masyarakat yang berada pada tempat terpencil telah dioperasionalkan 1 (satu) unit mobil perpustakaan keliling, yang merupakan bantuan pemerintah pusat (Kantor Perpustakaan Nasional di Jakarta) melalui kegiatan Operasional Mobil Perpustakaan Keliling oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Nasional Propinsi Sulawesi Selatan.

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

1. Penyelenggaraan Urusan Pertanian/Peternakan, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan pertanian (tanaman pangan), peternakan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp.9.526.735.575,- dengan realisasi belanja Rp.7.080.832.257,- atau 74,33 persen dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK), serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program tersebut adalah meningkatnya hasil pertanian dan kesejahteraan petani, hasil peternakan, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a) *Bidang Pertanian/Peternakan*

Pada kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan statistik pertanian telah disediakan dokumen data statistik pertanian sebanyak 4 dokumen. Selain itu, telah diikutinya pertemuan nasional (Penas) dan pertemuan daerah (Peda) sebagai *output* kegiatan promosi atas produksi pertanian/perkebunan unggul daerah. Realisasi lainnya adalah terlatihnya 40 orang petani dalam mengolah dan memasarkan hasil pertanian dalam kegiatan bimtek pengolahan hasil pertanian dan hortikultura. Selain itu juga, dilaksanakan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, pengembangan usaha agribisnis pedesaan (Dana Pendamping PUAP), analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang bersumber dari tugas pembantuan dilaksanakan di Kelurahan Wattang Bacukiki dan Lemoe yang memasuki tahapan kedua (Penumbuhan), sedangkan Kelurahan Galung Maloang pada tahapan awal (Persiapan). Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang bersumber dari APBD Kota Parepare juga dilaksanakan di Dusun Mangimpuru dan Lontangnge Kelurahan Wattang Bacukiki.

b) *Bidang Peternakan*

Kegiatan di Bidang Peternakan antara lain adalah vaksinasi penyakit ternak besar, anjing, dan unggas sebanyak 20 kali. Selain itu, realisasi lainnya adalah tersedianya jasa dan peralatan terhadap pemeriksaan kesehatan daging hasil ternak. Program GOS juga telah terealisasi dengan penyediaan sapi betina produktif sebanyak 36 ekor, kemudian tersedianya 10 jenis bahan inseminasi buatan.

c) *Bidang Kehutanan*

Realisasi kegiatan antara lain adalah pemeliharaan kawasan Hutan Alitta I dan Alitta II seluas 48,8 hektar. Demikian pula pada kawasan Hutan

JompiE seluas 13,5 hektar. *Output* lainnya adalah tersedianya dokumen mengenai potensi lahan perkebunan, adanya dokumen mengenai rehabilitasi hutan dan lahan, serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan.

d) *Bidang Kelautan dan Perikanan*

Realisasi program dan kegiatan antara lain adalah pembudidayaan ikan sebanyak 3 jenis, pembangunan kolam ikan air tawar sebanyak 11 unit dan 5 unit fasilitas PPI CempaE. Realisasi lainnya adalah peningkatan SDM nelayan sebanyak 30 orang yang dilengkapi dengan alat dalam pengolahan ikan sebanyak 30 set. Realisasi lainnya adalah peralatan dalam pengembangan terumbu karang sebanyak 20 set.

2. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata ini diselenggarakan Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.546.679.750,- dengan realisasi Rp.418.644.195,- atau 76,58 persen. Realisasi program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- a) *Program pengembangan pemasaran pariwisata*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata yang diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan duta wisata kota Parepare; promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri, yang diwujudkan dengan keikutsertaan Kota Parepare pada kegiatan pekan budaya dan potensi wisata baik dalam skala lokal/propinsi, nasional maupun event internasional. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Parepare, sehingga dimasa yang akan datang Kota Parepare juga dapat menjadi daerah tujuan wisata yang cukup diperhitungkan, karena kota Parepare sebagai daerah transit yang pelabuhannya selalu disinggahi kapal pesiar dari manca negara.

- b) *Program pengembangan destinasi pariwisata*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan yang diwujudkan dengan sosialisasi perda usaha kepariwisataan serta mengadakan pelatihan tari tradisional dan alat kesenian. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan PAD Kota Parepare dari sektor pariwisata.
- c) *Program pengembangan kemitraan*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kemitraan pariwisata, dimaksudkan sebagai upaya menggalang kerjasama serta pemahaman yang sama tentang pentingnya untuk menjaga dan melestarikan keberadaan obyek-obyek wisata yang salah satunya dengan melakukan penataan kawasan sumur jodoh. Di samping itu juga diharapkan meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan pengembangan usaha kepariwisataan di Kota Parepare.

3. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Urusan ini diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dengan alokasi belanja sebesar Rp.9.504.112.500,- dengan realisasi sebesar Rp.8.083.077.199,- atau 85,95 persen yang direalisasikan melalui program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a) Bidang Perindustrian

Untuk peningkatan kegiatan bidang perindustrian dimulai dengan program kegiatan kemudahan proses perizinan yang dilaksanakan untuk memonitoring legalitas perizinan usaha khususnya SITU dan TDI dan memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada pelaku usaha yang belum melengkapi perizinannya. Selain itu kegiatan ini dilakukan untuk

memaksimalkan penerimaan PAD dari jenis retribusi perizinan. Untuk memberikan dorongan terhadap hasil industri diikuti Pameran Dekranas yang dilaksanakan dalam rangka upaya promosi produk UMKM melalui keikutsertaan dalam pameran dekranas, yang dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di tingkat regional (Makassar) dan tingkat nasional (Jakarta).

b) Bidang Perdagangan

1) *Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan*, terealisasi melalui Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah barang kadaluarsa yang diperjual belikan dan melindungi hak konsumen, Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah, Bintek dan Penyerahan Bantuan Paket LPG 3 Kg yang dilaksanakan dalam upaya mendukung program Pemerintah Pusat dalam konversi minyak tanah ke gas.

2) *Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*, dilaksanakan melalui Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha dengan memonitoring legalitas perizinan usaha khususnya SIUP dan TDP dan memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada pelaku usaha yang belum melengkapi perizinannya. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk untuk untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kegiatan ini didukung oleh seluruh distributor dan penyediaan bahan pokok masyarakat sehingga harga yang ditawarkan dibawah harga pasar. Untuk peningkatan volume pedagang dilakukan Kajian Peluang Komoditi Perdagangan Antar Pulau Tahun 2011-2015.

Potensi Kota Parepare yang merupakan kawasan strategis pengembangan ekonomi terpadu sangat memungkinkan

pengembangan perdagangan antar pulau. Selain itu, dalam menangani lonjakan harga digelar Operasi Pasar Sembako.

Untuk menggerakkan sektor ekonomi, juga dibangun Pasar Kuliner dimana dana yang digunakan adalah dana DPPID dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pembangunannya masih berlanjut sampai saat ini.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan tugas pembantuan yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2011 Pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan pendanaan melalui 3 (tiga) SKPD untuk menjalankan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

1) Dinas Tenaga Kerja

Tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan dalam 2 (dua) program ; (1) *Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas*, (2) *Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja*. Untuk Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.447.310.000,- dan dilaksanakan dalam 8 (delapan) kegiatan antara lain menjahit, bordir, meubel, elektronika, teknik komputer, sepeda motor, instalasi penerangan, serta teknik pendingin. Sedangkan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dialokasikan anggaran sebesar Rp.428.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain Padat Karya Infrastruktur, Tenaga Kerja Mandiri, dan Pelayanan Informasi Pasar Kerja

2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tugas pembantuan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dalam bentuk *Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri*, melalui kegiatan Pembangunan Pasar Pusat UKM. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.5.000.000.000,-, dilaksanakan dengan sasaran untuk meningkatkan efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri. Dengan pembangunan Pasar Pusat UKM diharapkan dapat meningkatkan volume aktifitas perdagangan Kota Parepare. Selain itu, dapat menciptakan sarana perdagangan yang bersih, aman dan nyaman.

3) Dinas Kesehatan

Tugas pembantuan yang diterima Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dilaksanakan dalam beberapa program, yaitu :

a) *Program Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana;*

Adapun capaian yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan kunjungan ibu hamil KI, kunjungan ibu hamil K4, komplikasi kebidanan, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kompetensi kebidanan, pelayanan nifas, kunjungan neonatal (KN I), kunjungan neonatal lengkap, neonatus dengan komplikasi, kunjungan bayi, pelayanan anak balita, deteksi resti masyarakat, MTBS, Peserta KB Aktif. Dari 13 indikator tersebut, penanganan komplikasi kebidanan dan kunjungan bayi telah mencapai target nasional.

b) *Program Imunisasi*

Berdasarkan data cakupan imunisasi tingkat Kelurahan Kota Parepare, menunjukkan hasil pencapaian imunisasi berdasarkan Gain Uci indicator 85% yaitu semua kelurahan Kota Parepare mencapai angka 85% atau lebih pada 4 item imunisasi yakni BCG, Polio 4, DPT HB 3 dan campak.

c) *Program Gizi Masyarakat*

Dari data gizi Tahun 2011, ada beberapa indikator dalam menunjang capaian program gizi yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal kesehatan, antara lain Pelayanan Anak Balita di Posyandu, Perawatan Gizi Buruk, Bayi Usia 0-6 bulan mendapat ASI-Eksklusif, Penyediaan Buffer Stock MP-ASI daerah bencana, rumah tangga yang mengkonsumsi garam

beryodium, bayi dan balita yang mendapat kapsul vitamin A, pelaksanaan survailans gizi, Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan yang miskin.

Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target yaitu penyediaan buffer stock MP-ASI dan pelaksanaan survailans gizi.

- d) *Program Promosi Kesehatan*, melalui Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) dengan kegiatan Kelurahan Siaga Aktif yang merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. Untuk Kota Parepare pada Tahun 2011, Kelurahan Siaga Aktif baru mencapai 9 (sembilan) kelurahan atau 40,9 persen. Sementara kegiatan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), mengalami peningkatan kenaikan persentasi dari 35,8 persen pada Tahun 2010 menjadi 49,2 persen pada tahun 2011. Persentase pencapaian tersebut cukup berarti, walaupun masih dibawah dari Target Nasional yaitu 65 persen. Hal yang sama juga terlihat pada bertambahnya jumlah posyandu dari 117 buah pada Tahun 2010 menjadi 119 buah pada Tahun 2011
- e) *Program Pengendalian Penyakit*, realisasi pencapaian program untuk indikator penemuan dan penanganan penderita penyakit diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2011 adalah sebesar 52,59 persen dari data sasaran 270 kasus, hasil pencapaian kegiatan hanya sebanyak 142 kasus. Wilayah dan pencapaian kerja puskesmas dengan presentase pencapaian indikator tertinggi adalah *Puskesmas Lakessi* yaitu 145,71 persen, dengan sasaran 35 kasus dan pencapaian 51 kasus. Puskesmas Madising Na Mario juga memiliki presentase pencapaian indikator yang tinggi yaitu 120 persen (data sasaran 20 dengan hasil kegiatan 24). Sedangkan Puskesmas Lumpue dan Puskemas Lompoe

memiliki angka presentase terendah dengan masing-masing presentase pencapaian adalah 17,07 persen dan 16,67 persen.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan instansi vertikal di daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

1) Kerjasama Antar Daerah

Untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi, Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan membuat kerjasama antar daerah yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare. Kerjasama ini tertuang dalam konsep Penyelenggaraan Perkeretapian Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai angkutan massal yang terintegrasi inter dan antar moda di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil kerjasama tersebut diharapkan terwujudnya peran moda kereta api sebagai angkutan massal untuk mengatasi kemacetan yang terintegrasi inter dan antar moda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk meningkatkan peran moda Kereta Api sebagai angkutan umum massal yang terintegrasi inter dan antar moda di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare dengan Pusat Konservasi Tumbuh Kebun Raya Bogor Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tumbuhan, dalam bentuk mengupayakan pelestarian plasma nuftah tumbuhan lokal di Bilalange Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

3) *Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah*

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang terdiri dari Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka telah dibentuk kerjasama dan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan daerah Kota Parepare. Untuk menjabarkan kegiatan koordinasi, komunikasi dan dialog tersebut dilakukan dalam Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Selain itu, juga telah terbentuk Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), serta telah dibentuk Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare periode 2011-2013, tujuan utama pembentukan FKUB ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama masing-masing di Kota Parepare.

4) *Pembinaan Batas Wilayah*

Dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti di lapangan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, maka perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten Sidrap dan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun fisik di lapangan. Dengan hal tersebut Pemerintah Kota Parepare menyarankan kepada Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi dan mempertemukan tiga daerah (Pinrang, Sidrap dan Parepare) untuk dibahas bersama. Selanjutnya solusi penyelesaian dibuktikan dengan dokumen sebagai tanda bukti yang dimiliki masing-masing daerah.

5) *Pencegahan dan Penanggulangan Bencana*

Selama Tahun 2011 telah terjadi beberapa kali bencana, seperti angin kencang/puting beliung yang mengakibatkan 19 rumah warga mengalami rusak baik berat maupun ringan. Selain itu, bencana kebakaran sepanjang tahun 2011 terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan 26 rumah warga hangus terbakar. Bencana longsor juga terjadi di 4 titik lokasi yang berbeda, yang didominasi lokasinya di Kecamatan Bacukiki Barat. Keseluruhan kejadian yang terjadi selama Tahun 2011 di Kota Parepare masih ditetapkan sebagai status bencana tingkat Kabupaten/Kota. Selama Tahun 2011 telah dibayarkan sebesar Rp. 109.000.000 sebagai bantuan anggaran untuk perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya.

6) *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*

Berkenaan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sangat disadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Kota Parepare sebagai kota yang basis masyarakatnya heterogen mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari segala konflik yang berpotensi terjadi. Penguatan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, antar pemuka agama, serta peran aktif masyarakat akan terus dikedepankan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kota Parepare.

F. PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dijelaskan dalam laporan ini, sesungguhnya adalah merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare, masih terdapat banyak kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 ini kami publikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Parepare pada khususnya dan oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran pendapat ataupun tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui **SMS CENTRE** Pengaduan Masyarakat **081-241350077** atau berkunjung langsung pada kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon: 0421-21157 psw. 130, 131,207,214 Fax: 0421-21090. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan selengkapnya mengenai Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2011 dapat dibuka melalui website Pemda Kota Parepare (www.humas-parepare.info).

Sekian dan Terima Kasih!

Parepare, April 2012

**Plt. WALIKOTA PAREPARE,
WAKIL WALIKOTA**

H. SJAMSU ALAM